



Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Sampah Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran)

Ariyanto¹, Apri Budianto²

^{1,2} Universitas Galuh

Email : apribudianto@unigal.ac.id

Abstract. Based on the author's initial observations, it is known that the Public Works, Transportation, Communication and Informatics Agency of Pangandaran Regency in implementing the waste/cleanliness service policy is not optimal.

The research method used in this study is a descriptive research method with a qualitative approach. The primary data in this study is data obtained from interviews with informants directly. While secondary data sources are data collected from other sources which can be in the form of documents related to the problem being studied, The Public Works, Transportation, Communication and Informatics Agency in Pangandaran District, Pangandaran Regency has not been able to implement policies on waste management properly. This can be seen in the implementation of waste management which is not in accordance with the waste management mechanism according to Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2008 concerning Waste Management.

The obstacles faced in the implementation of waste management policies by the Public Works, Transportation, Communication and Informatics Agency of Pangandaran Regency are as follows: The technology for waste management is not yet available, Waste sorting has not been carried out by separating organic and non-organic waste, and The place and machine for recycling waste are not yet available.

Efforts made to overcome obstacles in the Implementation of Waste Management Policies by the Public Works, Transportation, Communication and Informatics Agency in Pangandaran District, Pangandaran Regency, namely: Submitting an application to the local government so that waste shredding and recycling machines are budgeted in the upcoming APBD, Cooperating with third parties (private sector) in terms of waste management and sorting, and Designing a place to recycle waste.

Keywords: Implementation of Law Number 18 of 2008, Public Services

Abstrak. Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan diketahui bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan kebijakan pelayanan persampahan/kebersihan belum optimal.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan secara langsung. Sedangkan sumber data sekunder adalah data-data yang dikumpulkan dari sumber lain yang dapat berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti,

Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum dapat mengimplementasikan kebijakan tentang pengelolaan sampah dengan baik. Hal ini terlihat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah belum sesuai dengan mekanisme pengelolaan sampah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran sebagai berikut : Belum dimilikinya teknologi dalam pengelolaan sampah, Belum dilakukannya pemilahan sampah dengan cara memisahkan sampah organik dan nonorganik, dan Belum tersedianya tempat dan mesin untuk mendaur ulang sampah,

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran yaitu : Mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah agar mesin pencacah dan daur ulang sampah dianggarkan dalam APBD tahun yang akan datang, Melakukan kerjasama dengan pihak ke tiga (swasta) dalam hal pengelolaan dan pemilahan sampah, dan Merancang tempat untuk mendaur ulang sampah.

Kata Kunci : Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Pelayanan Publik.

LATAR BELAKANG

Konsekuensi logis dari pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah daerah dengan segala potensi dan keterbatasannya harus mampu menggali dan mencari potensi daerahnya untuk memenuhi kebutuhan di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber keuangan yang memadai bagi pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada awalnya merupakan bagian dari Wilayah Kabupaten Ciamis dan melalui kebijakan Perintah Pusat dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Pangandaran diharapkan perkembangannya bisa maju lebih pesat.

Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran sebagai salah satu unsur organisasi yang memiliki beberapa tugas dan fungsi dalam rangka menjalankan tujuan organisasi. Berdasarkan hasil penelitian dan observasi awal yang penulis lakukan diketahui bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan kebijakan pelayanan persampahan/kebersihan belum optimal. Hal ini diketahui dari beberapa indikator yang memperlihatkan adanya gejala sebagai berikut :

1. Masih banyaknya sampah yang tercecer terutama di area pantai Pangandaran. Contoh : Kurangnya kesadaran masyarakat dan wisatawan terhadap kebersihan lingkungan sehingga membuang sampah sembarangan.
2. Pengangkutan sampah belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Contoh : Sesuai kesepakatan dengan masyarakat pengangkutan sampah dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Minggu, namun kenyataannya hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu bahkan hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
3. Masih rendahnya kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan persampahan/kebersihan. Contoh : Pegawai belum dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

Berdasarkan latar belakang dan masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan ke dalam bentuk Usulan Penelitian (Tesis) dengan mengambil judul: ***"Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Kebijakan dan***

Strategi Pengelolaan Sampah dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran”.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Surakhmad (2004:139) metode deskriptif adalah “Penelitian yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang”. Selanjutnya Surakhmad (2004:139) mengatakan bahwa :

Penelitian ini menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, satu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang nampak atau tentang satu proses yang sedang berlangsung, kecenderungan yang nampak, pertentangan yang meruncing, dan lain sebagainya.

Data dan Sumber Data

Tentang data kualitatif dalam suatu penelitian Miles dan Huberman (Silalahi, 2010:284) menjelaskan sebagai berikut ”Data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandasan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat”

Sumber data terbagi menjadi dua. Menurut Silalahi (2010:289) sebagai berikut :

- 1) Data Primer, adalah suatu obyek atau dokumen original-material mentah dari pelaku yang disebut ”*First-hand Information*”. atau data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi.
- 2) Data Sekunder, data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Sumber sekunder meliputi komentar, interpretasi, atau pembahasan tentang materi original.

Berdasarkan pengertian di atas, maka data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan secara langsung baik yang menyangkut diri, sikap dan perilaku atau data-data hasil dari pengamatan suatu peristiwa yang sedang terjadi. Sedangkan sumber data sekunder adalah data-data yang dikumpulkan dari sumber lain yang dapat berupa dokumen-dokumen misalnya berupa Peraturan Daerah, Program Kerja, artikel-artikel, atau hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data-data dengan cara mempelajari buku-buku dan bahan kepustakaan lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti.
2. Studi Lapangan, yaitu mengumpulkan data yang diperoleh secara langsung dilokasi penelitian dengan cara :
 - a. Observasi Partisipatif (*participant as observer*)

Dalam observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan observasi partisipatif ini maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

- b. Wawancara Mendalam (*Indepth interview*)

Adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

- c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Teknik Analisis Data

Sugiyono (2007:244) menyatakan bahwa : “Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menganalisis data menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2009:246) adalah sebagai berikut :

1. *Data Reduction (Reduksi Data)*

Data Reduction (Reduksi data) diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data ”kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan selama

apenelitian berlangsung, setelah peneliti di lapangan, sampai laporan tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari analisis data dengan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan, dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan final dapat diambil dan diverifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasi dengan berbagai cara; seleksi, ringkasan, penggolongan, dan bahkan kedalam angka-angka.

2. *Data Display (penyajian data)*

Data Display (Penyajian data) merupakan alur kedua dalam kegiatan analisis data. Data dan informasi yang sudah diperoleh di lapangan dimasukkan kedalam suatu matriks. Penyajian data dapat meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

3. *Conclusion Drawing/verification*

Conclusion Drawing/Verification, yaitu Begitu matriks terisi, maka kesimpulan awal dapat dilakukan. Sekumpulan informasi yang tersusun memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

4. *Tringulasi*

Dalam penelitian kualitatif, tringulasi merujuk pada pengumpulan data sebanyak mungkin dari berbagai sumber melalui berbagai teknik seperti survai, eksperimen, terdapat empat teknik yang digunakan yaitu survey, interview, observasi dan dokumentasi. (Alwasilah, 2003:150)

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pembahasan Tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran

Setelah penulis melakukan penelitian dengan melakukan observasi dan wawancara dengan mengajukan 20 indikator/item pertanyaan terhadap 27 orang informan, diperoleh data dan informasi mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi Dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, selanjutnya penulis deskripsikan hasil penelitian tersebut sebagai berikut.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, mekanisme pengelolaan sampah yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:

a. Menetapkan sasaran pengurangan sampah

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran khususnya Bidang Bina Marga dan Cipta Karya belum optimal dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah. Hal tersebut terlihat dari belum adanya kegiatan pengolahan sampah dengan cara mengguna ulang atau mendaur ulang sampah sehingga volume sampah menjadi berkurang. Artinya bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran khususnya Bidang Bina Marga dan Cipta Karya belum menetapkan sasaran pengurangan sampah sehingga volume sampah terus meningkat.

b. Mengembangkan teknologi bersih dan label produk

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran khususnya Bidang Bina Marga dan Cipta Karya dalam melaksanakan pengelolaan sampah tidak menggunakan mesin pencacah sampah tetapi yang dilakukan sampai sekarang baru sebatas pengelolaan berupa pengangkutan sampah dari perumahan penduduk atau industri maupun dari TPS (Tempat Pembuangan Sementara) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

c. Menggunakan bahan produksi yang dapat di daur ulang atau diguna ulang

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran khususnya Bidang Bina Marga dan Cipta Karya dalam penelolan sampah belum melaksanakan pengelolaan sampah dengan menggunakan bahan produksi yang dapat di daur ulang atau diguna ulang yang artinya bahwa dalam melakukan pengolahan sampah belum malakukan pemilahan terhadap jenis sampah yang dapat didaur ulang atau diguna ulang.

d. Fasilitas kegiatan guna atau daur ulang

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran khususnya Bidang Bina Marga dan Cipta Karya belum memiliki fasilitas kegiatan guna atau daur ulang sampah yang memadai sehingga dalam pelaksanaan pengolahan sampah tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal.

e. Mengembangkan kesadaran program guna ulang atau daur ulang

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat daur ulang sampah sudah pernah dilakukan namun belum secara rutin sehingga kesadaran dan peran serta masyarakat masih rendah. Bahkan sekarang setiap terjadi penumpukan sampah yang menjadi sasaran salalu pemerintah padahal tugas dan kewajiban dalam mengelola sampah adalah pemerintah bersama-sama dengan masyarakat. Artinya bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran sudah berupaya untuk mengembangkan kesadaran program guna ulang atau daur ulang kepada masyarakat namun belum memperoleh hasil yang memuaskan.

f. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan pengolahan sampah baru sebatas melakukan kegiatan pengumpulan sampah dari perumahan penduduk, hotel dan restoran dan tempat umum yang memiliki potensi besar dalam memproduksi sampah. Artinya bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran belum melakukan pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.

g. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran telah melakukan pengangkutan sampah dari dari sumber sampah yaitu perumahan penduduk, hitel dan restoran, industri dan tempat lainnya maupun dari Tempat Pembuangan Sampah Sementara ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah. Dan untuk memudahkan pengangkutan sampah di TPS ke TPA sekarang telah terbangun landasan atau Depo agar mempermudah pembuangan sampah ke *container* yang selanjutnya di angkut ke TPA.

h. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa metode pembuangan sampah yang sekarang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran masih menggunakan metode *open dumping* artinya sampah dibuang begitu saja ke TPA tanpa ada perlakuan khusus. Artinya bahwa

Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran telah melakukan pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah.

i. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa kegiatan pengolahan sampah menjadi barang yang dapat dipergunakan kembali dilakukan oleh pihak swasta. Dan pihak swasta pun melakukan kerjasama dengan sebagian pegawai untuk menjual barang bekas tersebut padanya untuk diolah kembali. Artinya bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran tidak melakukan pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah tetapi hal tersebut dilakukan oleh pihak swasta.

j. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran belum melakukan pengelolaan sampah secara maksimal yang dapat menjadikan sampah menjadi barang atau bahan yang dapat dimanfaatkan atau dikembalikan ke lingkungan dengan aman. Artinya bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran belum melakukan pengelolaan sampah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Pembahasan Tentang hambatan-hambatan tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran

Setelah penulis melakukan penelitian dengan melakukan observasi dan wawancara dengan mengajukan 20 indikator/item pertanyaan terhadap 27 orang informan, diperoleh data dan informasi mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi Dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah antara lain sebagai berikut.

1. Belum dimilikinya teknologi dalam pengelolaan sampah
2. Belum dilakukannya pemilahan sampah dengan cara memisahkan sampah organik dan nonorganik

3. Belum tersedianya tempat dan mesin untuk mendaur ulang sampah
4. Belum dilaksanakannya kegiatan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat tentang tata cara mendaur ulang sampah
5. Belum adanya kegiatan pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah
6. Belum adanya Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman

Pembahasan Tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran

Setelah penulis melakukan penelitian dengan melakukan observasi dan wawancara dengan mengajukan 20 indikator/item pertanyaan terhadap 27 orang informan, diperoleh data dan informasi mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi Dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran terdapat beberapa upaya-upaya yang dilakukan untuk mengataisi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah antara lain sebagai berikut.

1. Mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah dalam hal ini Penjabat Bupati agar mesin pencacah dan daur ulang sampah dianggarkan dalam APBD tahun yang akan datang
2. Melakukan kerjasama dengan pihak ke tiga (swasta) dalam hal pengelolaan dan pemilahan sampah.
3. Merancang tempat untuk mendaur ulang sampah
4. Membuat perencanaan untuk melakukan kegiatan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat tentang tata cara mendaur ulang sampah
5. Melakukan pendataan jenis sampah untuk dulakukan pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah
6. Perencanaan pembuatan pupuk organik yang berasal dari sampah

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian pada bab sebelumnya, selanjutnya penulis dapat menyimpulkan.

1. Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum dapat mengimplementasikan kebijakan tentang pengelolaan sampah dengan baik. Hal ini terlihat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah belum sesuai dengan mekanisme pengelolaan sampah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran sebagai berikut :
 - a. Belum dimilikinya teknologi dalam pengelolaan sampah
 - b. Belum dilakukannya pemilahan sampah dengan cara memisahkan sampah organik dan nonorganik
 - c. Belum tersedianya tempat dan mesin untuk mendaur ulang sampah
 - d. Belum dilaksanakannya kegiatan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat tentang tata cara mendaur ulang sampah
 - e. Belum adanya kegiatan pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah
 - f. Belum adanya Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman
3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran yaitu :
 - a. Mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah dalam hal ini Pejabat Bupati agar mesin pencacah dan daur ulang sampah dianggarkan dalam APBD tahun yang akan datang
 - b. Melakukan kerjasama dengan pihak ke tiga (swasta) dalam hal pengelolaan dan pemilahan sampah.
 - c. Merancang tempat untuk mendaur ulang sampah
 - d. Membuat perencanaan untuk melakukan kegiatan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat tentang tata cara mendaur ulang sampah

- e. Melakukan pendataan jenis sampah untuk dilakukan pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah
- f. Perencanaan pembuatan pupuk organik yang berasal dari sampah

Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran berjalan dengan baik maka dalam pengelolaannya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran perlu mengusulkan kepada pemerintah daerah agar sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah dapat dianggarkan pada APBD tahun yang akan datang
2. Agar hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Pangandaran dapat diminimalisir maka hal-hal yang perlu dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran adalah menyediakan lahan yang cukup luas yang dapat digunakan untuk melaksanakan pengelolaan sampah.
3. Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Pangandaran maka hal untuk dilakukan dengan Bidang Cipta Karya sehingga setiap anggaran yang masuk dapat dikelola secara mandiri sehingga dapat mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah dapat dilaksanakan dengan optimal. lebih baiknya keberadaan Seksi Kebersihan terpisah dengan Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran adalah dengan mengusulkan kepada pemerintah daerah/bupati untuk disediakannya anggaran yang memadai untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Baharun, H., Enas, E., & Noviana, R. L. (2022). Quality Improvement as A Strategy to Build Pesantren's Brand Credibility. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 14(1), 529–538. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i1.1583>
- Budianto, A., Darmawati Bastaman, I., & Herman, F. (2020). Promotion Mix, Individual Internal Environment, And Purchase Decision Making in Minimarket. In *Jurnal Bisnis dan Manajemen* (Vol. 21, Issue 1).
- Darna, N., Faridah, E., Lestari, M. N., & Tinia, A. G. (2024). Talent Management in Facing The Demand Of Environmental Changes: A Study In Galuh University. *Sosiohumaniora*, 26(1), 79–85. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v26i1.47161>
- Mulyatini, N., Herlina, E., Akbar, D. S., & Eko Prabowo, F. H. (2023). Analisis potensi pembentukan kawasan industri hasil tembakau dalam perspektif ekonomi. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(1), 334. <https://doi.org/10.29210/020231920>
- Mulyatini, N., Herlina, E., Faridah, E., & Rozak, D. A. (1860). Human Capital Management Model: A Perspective of Internal Supervision in Indonesia. *Talent Development & Excellence*, 12(1), 1860–1868. <http://www.iratde.com>
- Nuryani, L. K., Enas, E., Herman, M., Wahyudi, E., & Dianawati, L. (2022). Teachers' Perceptions of Academic Supervision in a Pandemic Era; Phenomenological Review. *AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(3), 679–692. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v6i3.3646>
- Sari, P., Muzaki, I. S., Mulyatini, N., Faridah, E., & Prawiranegara, B. (2019). Local own Revenue, Decentralization and Local Financial Independent. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 19(3), 250. <https://doi.org/10.25124/jmi.v19i3.2413>